

**SKRIPSI**

**DEMOKRASI INTERNAL PARTAI POLITIK DALAM PENENTUAN  
CALON KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2008 *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK-V)**

**Pembimbing :  
Yunita Syofyan, S.H., M.H  
Feri Amsari, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

**No.Reg : 15/PK V/V/2023**

**DEMOKRASI INTERNAL PARTAI POLITIK DALAM  
PENENTUAN CALON KEPALA DAERAH BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 *JUNCTO*  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG  
PARTAI POLITIK**

(Athoriq Rheza Alamsyah, 1810112039, Fakultas  
Hukum, Universitas Andalas, Tahun 2023, 78  
halaman)

**ABSTRAK**

Terdapat korelasi antara praktik demokratisasi internal partai politik dengan proses demokratisasi dalam kehidupan masyarakat luas karena demokrasi internal merupakan prasyarat yang harus dilakukan agar demokrasi dapat diwujudkan. Dalam proses rekrutmen, partai politik diharuskan melakukan rekrutmen secara demokratis, hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pada pasal 29 Undang-Undang Partai Politik. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu yang pertama adalah bagaimana bentuk pengaturan demokrasi internal partai politik dalam penentuan calon kepala daerah? Lalu rumusan kedua yaitu bagaimana perbedaan demokrasi internal partai politik dalam penentuan calon kepala daerah? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Dari hasil penelitian ini di dapatkan kesimpulan bahwa pengaturan demokrasi internal partai dalam penentuan calon kepala daerah Pasal 29 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 menyebutkan bahwa partai politik berhak melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia. Pasal 39 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang peran partai politik dalam pengaplikasiannya sangat diperlukan guna memberikan wadah serta sebagai kendaraan politik bagi para calon kepala daerah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tidak memberikan petunjuk secara rinci tentang apa dan bagaimana suksesi kepemimpinan yang demokratis tersebut, dan justru menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing parpol untuk mengaturnya secara internal dalam AD/ART. Sedangkan perbedaan demokrasi internal partai politik terlihat implementasi rekrutmen anggota partai dalam proses penentuan calon kepala daerah ada yang bersifat terbuka dan ada yang bersifat tertutup, ada yang demokratis dan ada yang tidak demokratis.